

SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI BUMDES DESA PUNGGUK KETUPAK KECAMTAN MERINGI KELINDANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Iwin Arnova¹, Lesi², Laras Bela Utami³, Rahmat Alamsyah⁴

iwinarnova89@gmail.com¹, lesibk12019@gmail.com², belautamilaras@gmail.com³,
alamsyahrahmat842@gmail.com⁴

Universitas Prof Dr Hazairin SH. Bengkulu

ABSTRAK

Desa memiliki potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, terutama karena keterbatasan modal untuk mengelola peluang yang ada. Hal ini menjadi perhatian pemerintah pusat, yang kemudian menerbitkan Undang-Undang Desa untuk memberikan kesempatan bagi desa agar dapat mengelola potensi tersebut secara mandiri dan profesional. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi desa dengan memaksimalkan pengelolaan sumber daya lokal. Namun, masih ada kendala dalam hal keterampilan pengelolaan keuangan dan akuntansi bagi SDM BUMDes. BUMDes diharapkan mampu memajukan ekonomi desa dan menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat. Melalui kewajiban Tridharma perguruan tinggi, dosen turut berperan dalam pengabdian masyarakat dengan menawarkan solusi atas permasalahan ini. Di Desa Pungguk Ketupak, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, terdapat potensi besar yang belum terkelola secara optimal. Dengan diadakannya sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan serta pendampingan berkelanjutan, diharapkan pengurus BUMDes akan lebih terampil dalam pengelolaan keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Kata Kunci: Potensi Desa, BUMDes, Pengelolaan Keuangan.

ABSTRACT

There is potential in the village which has so far been poorly managed village because the village does not yet have the capital to manage the existing potential. This matter is one of the highlights of the central government. Therefore, the Village Law was issued which gives villages the opportunity to manage the village themselves independently and professionally. The formation of a village business enterprise or commonly called an Agency Village-Owned Enterprises (BUMDes/BUMDesa) are expected to be the driving force this economy by maximizing the development of village potential There is. However, a further problem arises, namely Human Resources Problems (HR), the human resources owned by BUMDes are still low regarding financial management and BUMDes accounting. BUMDes is expected to be a driver of the village economy This will absorb as much labor as possible for village residents. That's why lecturers has the Tridharma obligations of higher education, one of which is doing community service to this community trying to provide solutions to these problems. PUNGGUK TUPAK VILLAGE MERINGI KELINDANG DISTRICT, CENTRAL BENGKULU DISTRICT has great potential but has not been managed well. With provide SOCIALIZATION regarding financial reports and provide assistance The village is continuously expected to have the output of BUMDes administrators competent in managing BUMDes, especially in the financial sector. This socialization provide material about financial reports that comply with financial accounting standards namely SAK-ETAP.

Keywords: Village Potential, BUMDes, Financial Management.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah entitas usaha yang diinisiasi oleh pemerintah dengan harapan dapat mendorong peningkatan ekonomi di desa. Sebagai sebuah badan usaha, BUMDes diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terkait kondisi keuangan kepada

pemilik atau pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang berkualitas dapat digunakan sebagai media komunikasi dan evaluasi bagi keberlangsungan usaha BUMDes di masa depan. Struktur modal serta laba atau rugi BUMDes tergambar dalam laporan keuangan tersebut.

Desa dapat mendirikan BUMDes dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu: 1) inisiatif dari pemerintah desa dan/atau masyarakat desa; 2) potensi ekonomi yang ada di desa; 3) sumber daya alam yang tersedia di desa; 4) sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelola BUMDes; 5) penyertaan modal dari pemerintah desa, baik dalam bentuk pembiayaan maupun aset desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes (Permendes No. 4 Tahun 2015).

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Pasal 12 ayat (3), pelaksanaan operasional BUMDes memiliki kewenangan untuk: (1) menyusun laporan keuangan untuk seluruh unit usaha BUMDes setiap bulan, (2) membuat laporan perkembangan aktivitas unit usaha BUMDes setiap bulan, dan (3) menyampaikan laporan perkembangan unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa minimal dua kali dalam setahun. Berdasarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2015, laporan keuangan BUMDes mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam bentuk laporan arus kas atau arus dana, serta catatan dan materi penjelasan lain yang menjadi bagian integral dari laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, BUMDes harus memperhatikan standar keuangan yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Menurut SAK ETAP (2013) di bab 3 tentang penyajian laporan keuangan, laporan keuangan lengkap suatu entitas harus mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini berarti bahwa BUMDes diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan SAK ETAP. Tujuan penerapan SAK ETAP bukan hanya menyediakan standar akuntansi yang sesuai untuk usaha kecil dan menengah atau entitas yang belum go public, termasuk BUMDes, tetapi juga untuk memastikan bahwa laporan keuangan dibuat dengan jujur dan transparan. Selain itu, BUMDes harus memberikan laporan perkembangan unit usaha kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa paling sedikit dua kali dalam setahun.

Pasal 88 ayat (1) menyatakan bahwa pendirian BUMDes harus disepakati melalui musyawarah desa, dan ayat (2) menyebutkan bahwa pendirian BUMDes tersebut kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa. Berdasarkan Permendes PDDT Nomor 4 Tahun 2015 mengenai pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes, masih banyak BUMDes di Indonesia yang belum menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya, meskipun sudah berkembang. Hal ini terbukti dalam penelitian oleh Rudini dan Nurhayati (2011), yang menunjukkan bahwa laporan keuangan di BUMDes Langkitin hanya terdiri dari laporan laba rugi dan neraca.

BUMDes adalah suatu kegiatan yang berfungsi menjalankan usaha di desa. Jenis-jenis usaha yang termasuk di dalamnya meliputi pelayanan ekonomi desa seperti: a. Jasa keuangan, jasa transportasi darat dan air, penyediaan listrik desa, serta usaha sejenis lainnya; b. Distribusi kebutuhan pokok ekonomi desa; c. Perdagangan hasil pertanian yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis; d. Industri dan kerajinan rakyat.

Menurut Hidayat (2018), terdapat beberapa ciri khas BUMDes yang membedakannya dari organisasi bisnis lainnya, yaitu: 1. Kekuasaan sepenuhnya berada di tangan desa dan dikelola secara kolektif oleh masyarakat desa; 2. Modal bersifat kolektif, berasal dari desa dan masyarakat, dan diatur melalui penyerataan modal; 3. Menggunakan filosofi bisnis yang berakar dari budaya lokal dalam kegiatan operasionalnya, yang diawasi bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan anggota masyarakat; 4. Bidang usaha yang dipilih disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar yang ada; 5. Keuntungan dari produksi dan penjualan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa; 6. Fasilitas dan pengawasan disediakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa.

Pengelolaan keuangan dan akuntansi BUMDes adalah dua hal yang berbeda. Pengelolaan keuangan dimulai dengan penyusunan anggaran, di mana akun modal dicatat saat dana desa disalurkan kepada BUMDes. Selain itu, penerapan akuntansi BUMDes sesuai standar merupakan suatu keharusan, karena laporan keuangan yang baik dapat mencerminkan kinerja keuangan yang baik pula.

Desa Pungguk Ketupak, Kecamatan Merigi Kelintang, Kabupaten Bengkulu Tengah, adalah desa binaan dalam program pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Hazairin SH Bengkulu. Desa ini dapat dijangkau dalam waktu 1 jam 16 menit dari pusat kota. Masalah utama yang dihadapi desa ini adalah kebutuhan edukasi mengenai laporan keuangan dan akuntansi BUMDes. Sumber daya manusia yang kurang terampil dan masih awam dalam penyusunan laporan keuangan menjadi kendala dalam pengembangan jenis usaha. Selain itu, terdapat rasa ketakutan dalam memanfaatkan modal yang tersedia.

Desa Pungguk Ketupak adalah desa yang subur dengan hasil tanaman yang melimpah. Potensi desa yang melimpah ini dimanfaatkan untuk berbagai usaha, seperti produksi beras dan hasil bumi lainnya. Diharapkan usaha ini akan berkembang lebih maju, sehingga hasil bumi tersebut tidak hanya dijual di dalam desa Pungguk Ketupak, tetapi juga dapat dipasarkan ke luar desa.

METODOLOGI

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Pungguk Ketupak, Kecamatan Merigi Kelintang, Bengkulu Tengah, pada hari Rabu, 16 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Ketua BUMDes, perangkat desa, dan pengurus BUMDes. Terlihat bahwa pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan akuntansi BUMDes masih kurang di desa ini. Hal ini tampak dari awal yang sosialisasi serta laporan keuangan yang diperiksa, yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntan Publik (SAK-ETAP).

Untuk mengatasi kendala tersebut, kami memberikan sosialisasi dasar mengenai laporan keuangan dan pengelolaan keuangan, serta format laporan yang sesuai dengan standar SAK-ETAP. Selama sosialisasi, peserta diberi kesempatan untuk bertanya langsung agar mereka dapat memperoleh jawaban segera dan memahami materi lebih mendalam. Kami juga memperagakan langkah-langkah meng-input laporan keuangan hingga laporan tersebut selesai, dengan menggunakan contoh kasus yang telah disiapkan. Setelah sosialisasi, kami juga memberikan pendampingan agar Desa Pungguk Ketupak dapat menjadi desa yang mandiri dalam mengelola keuangannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan ini merupakan bagian dari pengabdian masyarakat yang merupakan salah

satu aspek dari Tridharma Perguruan Tinggi Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin SH Bengkulu. Sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian, kami melakukan observasi awal untuk mengetahui profil desa, luas wilayah, potensi yang dimiliki desa, serta bisnis yang dijalankan oleh BUMDes. Selanjutnya, kami berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Ketua BUMDes mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 10.00 hingga 11.15 WIB di Desa Pungguk Ketupak, Kecamatan Merigi Kelintang, Bengkulu Tengah.

Pada awal sosialisasi, kami melakukan tes awal dengan memberikan pertanyaan dasar mengenai laporan keuangan. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur seberapa baik pemahaman peserta tentang laporan keuangan dan untuk memeriksa bentuk laporan yang ada. Ternyata, Desa Pungguk Ketupak hanya memiliki buku kas dan neraca yang sangat sederhana. Setelah itu, kami memberikan materi penjelasan tentang apa itu laporan keuangan, bentuk-bentuk laporan keuangan, serta alasan pentingnya menyusun laporan keuangan. Kami juga menjelaskan cara menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu menggunakan SAK-ETAP.

laporan keuangan yang harus disusun untuk setiap kegiatan usaha BUMDes meliputi Neraca dan Laporan Laba Rugi. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan BUMDes pada akhir periode. Sementara itu, Laporan Laba Rugi menyajikan rincian pendapatan dan beban BUMDes, sehingga dapat diketahui apakah ada laba atau rugi bersih.

Berikut foto kegiatan sosialisasi



Gambar 1. Foto bersama perangkat bumdes
(sumber: dokumentasi pribadi)



Gambar 2. Kegiatan sosialisasi
(Sumber: dokumentasi pribadi)

b. Menelaah Permasalahan

Berdasarkan hasil survei dan sosialisasi awal dengan aparat desa dan masyarakat, salah satu masalah yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes adalah terkait pengelolaan

keuangan, khususnya dalam hal pengelolaan sumber dana, pencatatan, dan penyajian laporan keuangan yang akuntabel. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini akan difokuskan pada: 1. Memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan manajemen keuangan BUMDes. 2. Menyelenggarakan pelatihan untuk penyusunan laporan keuangan BUMDes.

Dari hasil observasi awal, terlihat bahwa pencatatan laporan keuangan hanya dilakukan dengan menggunakan buku kas, dan pencatatan tersebut dilakukan secara manual. Beberapa peserta juga menggunakan komputer (Ms. Excel). Penerapan akuntansi dalam laporan keuangan menjadi salah satu komponen penting yang harus dimiliki oleh koperasi jika mereka ingin mengembangkan usaha mereka (Yusmaniart & Ekowati, 2019).

Untuk memperkuat pemahaman Desa Pungguk Ketupak tentang laporan keuangan, kami kemudian memberikan materi mengenai laporan keuangan dasar. Selanjutnya, kami menjelaskan pentingnya memahami laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP, di mana laporan keuangan yang berdasarkan SAK-ETAP meliputi:

1. Neraca

Neraca adalah salah satu bagian dari laporan keuangan perusahaan yang disusun untuk suatu periode akuntansi dan menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca harus mencakup paling tidak pos-pos berikut:

1. Kas dan setara kas;
2. Piutang usaha dan piutang lainnya;
3. Persediaan;
4. Properti investasi;
5. Aset tetap;
6. Aset tidak berwujud;
7. Utang usaha dan utang lainnya;
8. Aset dan kewajiban pajak;
9. Kewajiban yang diestimasi;
10. Ekuitas.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi bertujuan untuk menyajikan laba atau rugi suatu entitas, yang mencerminkan kinerja keuangan dalam periode tertentu. Laporan ini mencakup pendapatan, beban keuangan, beban pajak, serta laba atau rugi neto. Laporan Laba Rugi setidaknya harus mencakup pos-pos berikut:

1. Pendapatan;
2. Beban keuangan;
3. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;
4. Beban pajak;
5. Laba atau rugi neto.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, serta pos pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas selama periode tersebut. Selain itu, laporan ini mencakup dampak perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode itu. Tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas, laporan ini juga mencakup jumlah investasi oleh pemilik serta dividen dan distribusi lainnya kepada pemilik ekuitas selama periode tersebut. Laporan Perubahan Ekuitas juga menunjukkan:

- (i) Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
- (ii) Perubahan ekuitas selain perusahaan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

4. Laporan arus kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai perubahan historis kas dan setara kas entitas, yang secara terpisah menunjukkan perubahan yang terjadi selama satu periode akibat aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Berisi informasi tambahan yang melengkapi laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian mengenai angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, serta informasi tentang pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan tersebut.

SAK ETAP pada paragraf 2.1 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang berguna bagi berbagai pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, terutama bagi mereka yang tidak berada dalam posisi untuk meminta laporan keuangan khusus guna memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan tidak hanya untuk menjadi penggerak utama perekonomian desa, tetapi juga sebagai sumber pendapatan desa. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara profesional agar kedua tujuan tersebut dapat tercapai (Soleh, Chabib, dan Heru Rochmansyah, 2014).

c. Solusi yang di berikan

Dengan adanya sosialisasi ini di harapkan menjadi jawaban untuk masalah yang dihadapi oleh pihak desa Pungguk ketupak dalam menjalankan BUMDesnya. Memberikan sosialisasi materi tentang laporan keuangan dan akuntansi BUMDes. Dimana penjelasan dimulai dari menjelaskan anggaran, akun-akun yang terkait dalam anggaran tersebut, menjelaskan dimana letak anggaran jika terdapat penerimaan dana dari dana desa. Selanjutnya menjelaskan apa itu laporan keuangan, jenis laporan keuangan, dan langsung memberikan contoh laporan keuangan.

KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan dan akuntansi BUMDes di desa Pungguk ketupak dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam beberapa bagian seperti: Sumber Daya Manusia yang mumpu untuk melakukan unit bisnis bumdes, kurangnya pemahaman tentang laporan keuangan dan bagaimana pemahaman laporan keuangan sebagai alat komunikasi para stakeholder, Belum terampilnya pengelola Bumdes terhadap aplikasi Ms. Excel dan yang terakhir pencatatan transaksi harus tetap didampingi sampai mereka dapat memenuhi syarat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar peraturan pelaporan BUMDes. Dari kegiatan itu dapat disimpulkan metode yang digunakan yaitu memberikan penyuluhan, diskusi, pendampingan.

Setelah melalui program pendampingan yang dilakukan oleh tim, maka mitra binaan semoga mencapai beberapa kemajuan. Namun demikian, pendampingan tersebut tidak bisa berhenti setelah kegiatan selesai. Disarankan, pemerintah desa Puungguk ketupak untuk lebih proaktif melakukan konsultasi kepada tim pendamping atau pihak lain yang kompeten, agar BUMDesnya lebih maju dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bandung: Fokusmedia*
- Hidayat Taufik, Pujiati. 2018. *Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Desa Kecamatan Bandung Diwek Jombang.COMVICE*, Vol 2 No 1, April 2018.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta,
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang *Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.
- Yusmaniart, Y., & Ekowati, S. (2019). *Laporan Keuangan Koperasi Berbasis Media Excel For Accounting (EFA)*. *Pengabdian Masyarakat Raflesia*, 2(1), 127-137, *Jurnal Bumi*